



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sebanyak 235 Formasi Diusulkan dalam Penerimaan CPNS 2026

Sidoarjo, Bhirawa

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo telah mengusulkan sebanyak 235 formasi untuk penerimaan CPNS tahun 2026 kepada Kementerian Menpan RB.

Kepala Bidang pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Sidoarjo, Farida Puspitasari SKom, mengatakan usulan tersebut telah dikirim kepada Kemenpan RB pada 31 Maret 2026.

“Daerah se Indonesia juga mengusulkan penerimaan CPNS tahun ini, kita masih menunggu jumlah pasti yang nanti akan disetujui oleh Kemenpan RB,” komentar Farida, Rabu (10/6) kemarin.

Dari 235 formasi yang diusulkan tersebut, rinciannya untuk formasi guru/tenaga pendidik sebanyak 8, formasi tenaga kesehatan sebanyak 119 dan tenaga teknis sebanyak 108.

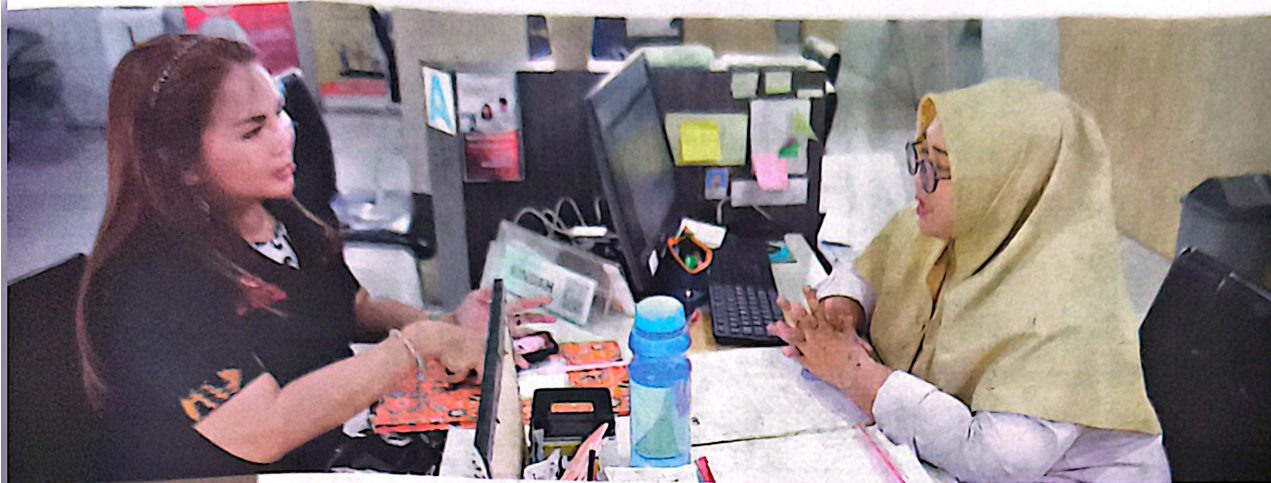
Tenaga guru/pendidik, kata Farida, pada penerimaan CPNS 2026 ini diusulkan sebanyak 8 formasi, karena telah banyak terisi pada tahun 2024 dan 2025 dari program PPPK.

Formasi tenaga teknis pada usulan penerimaan CPNS 2026 ini lebih banyak dari formasi tenaga guru, lanjut Farida, juga karena OPD -OPD di Pemkab Sidoarjo banyak usulan membutuhkannya.

Karena usulan penerimaan CPNS dilakukan pada tahun 2026, menurut Farida, besar kemungkinannya tes penerimaan juga akan dilakukan pada tahun 2026 ini juga.

“Kita masih menunggu petunjuk teknis yang pasti dari Kementerian PAN RB,” kata Farida. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa
Media Cakrawala Sidoarjo



CARI INFORMASI: Pegawai Dinas Dikbud Rindah melayani konsultasi calon orang tua murid terkait SPMB kemarin (10/6).

ANGGER BONDAN/JAWA POS

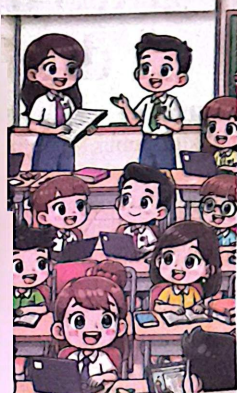
KETENTUAN JALUR PRESTASI BELAJAR

Kuota **80** persen dari seluruh kuota jalur prestasi

Nilai rapor menyumbang **60** persen penilaian

40 persennya dari nilai TKA

Pakai rata-rata nilai kelas IV, V, dan semester I kelas VI.



Sumber: Panitia SPMB

TKA Berkontribusi 40 Persen pada Jalur Prestasi Belajar

Sisanya Nilai Rapor

SIDOARJO - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP negeri di Kota Delta memasuki tahap pendaftaran jalur prestasi. Khusus jalur prestasi belajar, nilai rapor dan hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) jadi dasar pertimbangan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netty Lastiningsih

mengatakan, pendaftaran jalur prestasi belajar berlangsung selama tiga hari. Yakni 15-17 Juni. "Proses validasi data dijadwalkan 18 hingga 19 Juni," kata Netty.

Dia mengatakan, seluruh proses dilakukan secara daring melalui sistem SPMB yang telah disiapkan. Sehingga, peserta didik bisa memantau di *website* resmi SPMB.

Peringkat Siswa Ditentukan Sistem
Kabid Mutu Pendidikan Dinas Dikbud Sidoarjo Lilik

Sulistyowati menjelaskan, nilai rapor memiliki bobot lebih besar dibandingkan TKA. Yakni 60 persen. Nilai yang digunakan merupakan rata-rata nilai kelas IV, V, dan semester I kelas VI.

"Sementara, hasil TKA menyumbang 40 persen dari total penilaian," kata Lilik. Dia mengatakan, mata pelajaran yang masuk dalam penilaian meliputi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, serta PJOK.

Menurut Lilik, seluruh nilai tersebut akan diolah oleh sistem untuk menentukan peringkat siswa. Jika terdapat nilai yang sama, siswa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah tujuan akan diprioritaskan.

Penentuan siswa jalur prestasi belajar dilakukan berdasarkan kelas masing-masing. Setiap kelipatan 14 siswa dalam satu kelas akan menghasilkan satu kuota siswa berprestasi. Penentuan siswa yang masuk kuota prestasi dilakukan secara otomatis oleh sistem. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DISHUB

“Kami akan panggil jukir dan pihak-pihak yang enggan kerja sama.”

Fajar Rusdiono

Kepala UPTD Parkir Dishub Sidoarjo

Panggil Pengelola Parkir yang Tolak Kerja Sama dengan Pemkab

SIDOARJO – Masih ada 14 pengelola titik parkir yang belum bekerja sama dengan Pemkab. Dishub Sidoarjo akan memanggil mereka untuk memberikan teguran.

Kepala UPTD Parkir Dishub Sidoarjo Fajar Rusdiono mengatakan, saat ini sudah ada 192 titik parkir yang bekerja sama dengan Pemkab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil disetor sebesar Rp 2 miliar. Untuk sejumlah titik parkir yang belum dikelola, lokasinya tersebar di sejumlah lokasi. Seperti di Pasar Krembung, Pasar Tanggulangin, Puskesmas Urangagung I, Puskesmas Urangagung II dan Puskesmas Sidodadi.

“Kami akan panggil jukir dan pihak-pihak yang enggan kerja sama,” kata Fajar. Dia mengatakan, masih banyak potensi pendapatan dari sektor parkir yang belum tergarap maksimal. Fajar berharap ada titik temu dengan pengelola parkir. (ful/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

OBJEK PERKARA: Akses Perumahan Mutiara Regency-Mutiara City belum bisa dibangun karena masih ada penolakan dari warga.

Hakim PTUN Tinjau Sengketa Akses Mutiara Regency–Mutiara City

SIDOARJO – Kasus pembongkaran tembok pembatas dan pembangunan akses Perumahan Mutiara Regency-Mutiara City masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Majelis hakim dari PTUN Surabaya meninjau objek sengketa pada Selasa (9/6) sore untuk melihat gambaran yang sebenarnya.

Kuasa hukum warga Mutiara Regency Eko Prastyan mengatakan, warga Mutiara Regency mengaku tidak pernah menerima surat pemberitahuan mengenai pembongkaran tembok untuk akses jalan warga Perumahan Mutiara City. "Kami nilai kebijakan tersebut tidak melibatkan warga. Sehingga, selepas pembongkaran kami ajukan gugatan ke PTUN," katanya.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo Komang Rai Warmawan menyatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi untuk memperkuat bukti dalam persidangan. "Rencananya kami akan menghadirkan saksi dari warga Perumahan Mutiara Harum yang berbatasan dengan Mutiara Regency," katanya.

Komang menjelaskan bahwa warga Mutiara Harum mendukung dibukanya akses jalan yang saat ini menjadi objek gugatan. Menurut dia, selama ini warga Mutiara Regency juga memanfaatkan akses jalan yang berada di kawasan Perumahan Mutiara Harum. "Warga Mutiara Harum menyetujui akses tersebut dibuka," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembayaran Retribusi Berbasis Digital Diperluas ke Tiga Pasar

SIDOARJO - Sistem pembayaran retribusi berbasis digital terus diperluas. Setelah Pasar Larangan, kini uji coba pembayaran melalui aplikasi My Retribusi diterapkan di Pasar Porong, Pasar Krian, dan Pasar Sepanjang.

Plt Kepala Disperindag Sidoarjo Happy Setyaningtyas Astrawati mengatakan, belum semua pedagang di ketiga pasar memakai sistem baru. Tahap

awal, program hanya 60 pedagang yang dipilih untuk menerapkannya. "Ketiga pasar itu kami pilih karena memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi," katanya kemarin (10/6).

Di Pasar Sepanjang terdapat sekitar 1.500 kios, los, dan togu. Sementara Pasar Krian memiliki 2.338 kios, los, dan togu. Sedangkan Pasar Porong mencapai sekitar 3.000 kios, los, dan togu. Happy menjelaskan, melalui

pembayaran berbasis digital, pembayaran retribusi tak bergantung pada sistem manual. Sistem tersebut membantu pengelola pasar dalam melakukan pencatatan dan pengawasan pembayaran retribusi. Menurut Happy, terdapat 19 pasar yang berada di bawah pengelolaannya. Karena itu, dia akan terus mendorong penerapan e-retribusi hingga ke seluruh pasar. (ful/hen)



ANGGEE BONDAN/JAWA POS

PAKAI APLIKASI: Pembayaran retribusi berbasis digital diharapkan mendorong ketertiban pemilik kios di Pasar Porong setor PAD.

Jawa Pos

Kelompok LSL Miliki Risiko Tertinggi Penularan HIV/AIDS

KOTA-Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus per April 2026 menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai faktor risiko dan cara penularan HIV.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Hinu Tri Sulistijorini Ririn, mengungkapkan bahwa kelompok dengan risiko tertinggi tertular HIV saat ini adalah LSL (Laki Seks dengan Laki-laki).

“Kelompok risiko tertinggi dari HIV/AIDS adalah LSL atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Perlu dipahami, LSL adalah istilah perilaku seksual, bukan identitas atau orientasi seseorang,” ujarnya.

Menurut Hinu, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo saat ini juga lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibanding perempuan. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. “Kasus yang paling banyak terjadi saat ini adalah pada laki-laki,” katanya.

Terkait meningkatnya jumlah kasus dalam seta-

hun terakhir, Hinu menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap penularan HIV.

Salah satunya adalah perilaku seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan seksual dan melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, penularan HIV juga dapat terjadi melalui paparan darah yang terinfeksi, termasuk penggunaan jarum suntik

secara bergantian. “Penularan HIV terjadi melalui tiga media utama, yaitu darah, cairan sperma, dan cairan vagina,” jelasnya.

Hinu menegaskan, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penularan HIV masih perlu terus ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak informasi keliru yang berkembang dan memunculkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHIV). (dik/vga)

PENGUMUMAN AMDAL

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Pasal 28 Ayat 1 dan ayat 2 Poin (a) tentang pelibatan masyarakat terkena dampak langsung dalam proses Amdal, maka disampaikan bahwa :

PT Mitra Usaha Propertindo selaku penanggung-jawab kegiatan akan menyusun Dokumen Amdal Rencana Pengembangan Perumahan Java Residence Cluster 5 Tahap 2 yang berlokasi di Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya PT Mitra Usaha Propertindo telah membangun 230 unit rumah di tahap 1 pada lahan seluas 34.750 m², di Desa Ganting, Kecamatan Gedangan. Selanjutnya PT Mitra Usaha Propertindo berencana mengembangkan Perumahan Java Residence Cluster 5 Tahap 2 sebanyak 122 unit pada lahan seluas 16.248 m² sehingga total jumlah unit rumah adalah 353 unit, dengan luas lahan total 50.998 m². Rencana pengembangan perumahan menimbulkan berdampak negatif dan positif pada lingkungan. Dampak negatif yang timbul antara lain adalah penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dihasilkannya air limbah dan sampah, perubahan kinerja jalan, peningkatan debit limpasan, sedangkan dampak positif yang timbul antara lain persepsi dan sikap positif masyarakat, kesempatan kerja, peluang usaha, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Untuk mengelola dampak tersebut, PT Mitra Usaha Propertindo telah menyiapkan pengelolaan lingkungan antara lain dengan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi yang disyaratkan, pengangkutan material dengan penutupan bak truk, penyiraman area rawan debu, mengolah air limbah, mengelola sampah dan Limbah B3, melaksanakan rekomendasi teknis Andalalin dan kajian sistem drainase, penghijauan, komunikasi dan koordinasi dengan pembina masyarakat Dusun/Desa, Kecamatan maupun instansi terkait. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan **Saran, Pendapat dan Tanggapan** terkait rencana pengembangan Perumahan Java Residence Cluster 5 Tahap 2 dapat menyampaikannya kepada:

1. **PT Mitra Usaha Propertindo**
Ruko Kahuripan Avenue Nomor 27-30 Kahuripan Nirwana Sidoarjo,
Desa/Kelurahan Sumpat, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
2. **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**
Jalan Raya Siwalan Panji No 36 Buduran
Telp. (031) 8963184
3. **Konsultan Perorangan Dr. Ir Titien Setyo Rini, MT**
Jl. Mojokidul Blok I no 2A Surabaya
Telp. 081252712261

Pengumuman di atas berlaku selama waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan
Sidoarjo, 11 Juni 2026

Pemrakarsa,
PT Mitra Usaha Propertindo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

B-news
Trending **Akar Konflik di Balik Guruh Cuan Janur di Banyuwangi - Temu Pendidik Nusantara XIII di Mojokerto!**

Dukung Pendidikan Inklusif, Bupati Sidoarjo Dorong Lembaga Swasta Berinovasi dan Berkembang

Redaksi
Rabu, 10 Jun 2026 20:12 WIB

Bupati Sidoarjo Subandi membuka Pentas Pendidikan Agama Islam/PAI tingkat SD se Kabupaten Sidoarjo di SD Muhammadiyah 1 Candi, Rabu, (10/6/2026). (foto: dok humas)

SIDOARJO | B-news.id - Bupati Sidoarjo H. Subandi terus mendorong kemajuan lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya lembaga pendidikan negeri saja yang didorong. Namun juga lembaga pendidikan swasta juga harus mampu menjadi pondasi utama pembangunan bangsa.

Generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing diharapkan mampu dicetak di sekolah-sekolah swasta. Salah satunya dapat dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Candi.

Baca Juga: SD Muhammadiyah 3 Ikrom Taman Undang Wabup Sidoarjo Isi Podcast Sekolah

Hal tersebut diucapkan Bupati Sidoarjo H. Subandi usai membuka Pentas Pendidikan Agama Islam/PAI tingkat SD se Kabupaten Sidoarjo di SD Muhammadiyah 1 Candi, Rabu, (10/6).

Bupati H. Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen membantu kemajuan sekolah-sekolah swasta yang ada. Ia berharap sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Sidoarjo mampu bersaing dengan sekolah negeri.

Tidak hanya pada sarana dan prasarannya saja, namun juga pada manajemen pengelolaan sekolah. Ia ingin lembaga pendidikan swasta dapat berjalan bersama untuk mencetak generasi bangsa yang berkarakter dan berdaya saing global.

Baca Juga: Bahas Penanganan Lumpur Lapindo, Bupati Sidoarjo Sepakat Buka Kembali Satgas Bersama PT Minarak Lapindo Jaya

"SD Muhammadiyah 1 Candi ini kita dorong untuk mampu bersaing, tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah lainnya karena sekolah adalah tempat untuk membentuk karakter anak yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual namun juga berakhlak mulia," ucapnya.

Bupati H. Subandi sendiri merasa bangga dengan berdirinya SD Muhammadiyah 1 Candi. Menurutnya sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang cukup baik dalam pengelolaannya. Ia melihat pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut masih terus berlangsung.

Baca Juga: Momen Hari Lahir Pancasila 2026, Subandi Tekankan : Ideologi Negara Harus Hadir Nyata di Kehidupan Sehari-hari

Ia pun akan berupaya membantu anggaran pembangunannya. Anggaran tersebut akan diperolehnya melalui anggota DPRD Jatim yang tak lain istrinya sendiri dr. Sriatun. Seperti bantuan yang diberikan tahun kemarin di Desa Pabean dan MI di Desa Pabean.

"Meski ada efisiensi, Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memberikan bantuan seperti kepada SD Muhammadiyah 1 Candi yang akan kita upayakan, insha allah ada bantuan dari provinsi, dari ibu bupati, nanti kita siapkan setidaknya Rp. 2 milyar pada tahun anggaran 2027," ujarnya. (*)

Editor : **Redaksi**



Terima Banyak Aduan, Komisi B Panggil Pansel Calon Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo

by RadarJatim — 11 Juni 2026 in Politik



H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Beberapa waktu lalu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo telah memanggil Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo 2026-2031.

Rupanya Komisi B DPRD Sidoarjo berencana akan memanggil ulang Pansel, setelah mendapatkan keluhan dan pengaduan terkait proses seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA), telepon hingga komunikasi langsung kepada anggotanya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan psikotes dan proses verifikasi administrasi peserta seleksi.

Tingginya intensitas pengaduan yang masuk ke lembaga legislatif itu menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap proses seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo saat ini.

“Beberapa hari terakhir, kami menerima cukup banyak pengaduan melalui WA maupun telepon dari masyarakat dan peserta seleksi. Ada yang mempertanyakan pelaksanaan psikotes, ada pula yang mempertanyakan proses verifikasi administrasi dan dasar kelulusan peserta. DPRD tentu berkewajiban menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme pengawasan yang resmi,” kata Bambang Pujianto kepada awak media, Rabu (10/6/2026).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyampaikan bahwa DPRD Sidoarjo tidak ingin berkembang asumsi, spekulasi maupun polemik berkepanjangan yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

Untuk itu, Komisi B DPRD Sidoarjo telah melayangkan surat undangan kepada Ketua Pansel beserta timnya untuk hadir dalam forum rapat dengar pendapat atau *hearing* yang dijadwalkan pada Kamis (11/6/2026) besok.

“DPRD akan meminta penjelasan mengenai seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan, mulai dari pelaksanaan psikotes, tata tertib seleksi, mekanisme verifikasi administrasi hingga dasar penetapan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi,” sampainya.

Selain menerima pengaduan terkait tahapan psikotes, Komisi B DPRD Sidoarjo juga menyoroti mekanisme verifikasi persyaratan pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial, dan pernah memimpin tim sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018.

Bambang menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap kewenangan Pansel Calon Anggota Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo dalam menentukan peserta yang lolos maupun tidak lolos.

Namun DPRD Sidoarjo memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip *merit system* serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

“Yang kami pertanyakan bukan siapa yang lolos atau tidak lolos, tetapi bagaimana Pansel memverifikasi pengalaman manajerial dan pengalaman memimpin tim para peserta. Karena syarat tersebut bersifat substantif dan wajib dibuktikan secara objektif,” tegasnya.

Menurutnya, pengalaman manajerial tidak cukup dibuktikan dengan hanya daftar riwayat hidup atau surat pernyataan dari peserta seleksi. Akan tetapi, Pansel harus memiliki instrumen verifikasi yang jelas melalui dokumen, seperti Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan, struktur organisasi perusahaan, kontrak kerja, uraian jabatan atau *job description*, surat pengalaman kerja maupun dokumen lain yang menunjukkan kewenangan memimpin dan mengelola organisasi.

Komisi B DPRD Sidoarjo juga akan mempertanyakan belum adanya penjelasan terbuka mengenai parameter yang digunakan untuk menilai unsur ‘pernah memimpin tim’ tersebut.

Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terhadap objektivitas proses seleksi. Terlebih berkembang informasi adanya peserta yang dinyatakan lolos administrasi, namun dipersialkan terkait pemenuhan syarat pengalaman manajerial.

“Kalau parameter dan alat verifikasinya tidak dijelaskan secara terbuka, tentu akan muncul ruang tafsir dan spekulasi di masyarakat. Karena itu kami ingin memperoleh penjelasan resmi dari Pansel,” ujarnya.

Legislator asal Kecamatan candi itu menambahkan bahwa keterbukaan proses seleksi sangat penting untuk menjaga legitimasi Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang nantinya terpilih.

Karena direksi yang lahir dari proses transparan dan akuntabel akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik, dukungan internal perusahaan serta legitimasi dalam menjalankan kebijakan strategis perusahaan.

Komisi B DPRD Sidoarjo menilai bahwa transparansi mengenai tata tertib seleksi, metode verifikasi administrasi dan dasar penetapan peserta yang lolos merupakan bagian dari penerapan prinsip *good corporate governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami ingin seluruh proses seleksi ini terang-benderang dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin terbuka Pansel menjelaskan proses yang telah dilakukan, maka semakin kuat legitimasi hasil seleksi yang nantinya ditetapkan. DPRD (Sidoarjo, red) hanya ingin memastikan proses seleksi Direksi Perumda Delta Tirta berjalan sesuai hukum, sesuai prinsip merit dan menghasilkan calon direksi yang benar-benar memiliki kompetensi serta pengalaman sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,” terangnya. (mams)

Related Posts



DIDUGA NGAWUR PROYEK PENINGKATAN JALAN PEMUKIMAN DESA TAMBAKSAWAH SALAH BISTEK TERINDIKASI KORUPSI, PERANGKAT DESA MENCAK-MENCAK

Sidoarjo, Pojok Kiri-

Seperti diberitakan sebelumnya di Harian Pojok Kiri bahwa Proyek Pembangunan peninggian dan pemasangan paving di Rt/06 Rw/01 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diduga ngawur salah Bistek tanpa adanya papan informasi mengenai luas maupun anggaran yang digunakan sehingga terindikasi korupsi. Sementara Perangkat Desa Tambaksawah, L, langsung mencak mencak, ia merespon pemberitaan di koran ini dan sontak menelpon wartawan Pojok Kiri, Selasa, 9/6/26, ia akan memberikan klarifikasi, namun hingga kini belum ada klarifikasi nya.

Sedangkan pentingnya papan informasi yang bertujuan untuk Azas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, sehingga masyarakat dapat memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran, untuk tujuan kepercayaan masyarakat dengan adanya papan informasi proyek pavingisasi, masyarakat dapat mengetahui secara detail proyek dan memantau pembangunan tersebut sesuai dengan harapan apa tidak. sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam hal ini sebagai pengguna anggaran yang masuk di APBDes. Juga mempermudah pengawasan



Peningkatan Jl Pemukiman Bodong tanpa Papan Nama Proyek.

proyek oleh masyarakat dan pihak yang berwenang sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran.

Salah satu warga Rt 06 Dy, yang enggan menyebutkan namanya lengkapnya menyampaikan papan informasi proyek peningkatan pavingisasi adalah menginformasikan secara detail kepada masyarakat termasuk nama proyek, lokasi proyek, sumber dana, nilai anggaran, dan waktu pelaksanaan itu wajib sebagai amanat Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik th 2008

no 14. Beberapa aspek penting peraturan daerah proyek jalan Desa pavingisasi mencakup antara lain sumber dana pavingisasi jalan Desa umumnya menggunakan dana Desa, seperti yang tertuang dalam peraturan mentridesa No.4 Tahun 2017 ini dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat Desa dalam proses perencanaan

dan pengawasan, ujunya pada Jurnalis Koran Harian Pojok Kiri saat berada dislokasi pekerjaan.

Sementara itu Dian Setiyono Ketua Rt/06 saat dikonfirmasi melalui WhatsApp maupun telp menyampaikan mas silakan tanyakan ke pemerintah desa Tambaksawah ujar Dion. Padahal sesuai dengan regulasi yang mengatur untuk pelaksanaan pembangunan fisik ada TIm Pelaksanaan Kegiatan TPK yang penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan diduga TPK takut memberikan statemen kalau tidak sinkron dengan Pemerintah desa.

Terpisah Kasie Kesra

Desa Tambaksawah Wahyu saat dikonfirmasi mengenai ketidaktransparan pembangunan peningkatan jalan pemukiman di Rt/06. tidak adanya papan nama pembangunan yang di tuangkan dalam undang-undang KIP 14 tahun 2008 ia mengatakan memang papan nama proyek belum terpasang dilokasi pekerjaan Pavingisasi ditanya anggaran berapa juga tak tau wahyu hanya menjawab akan dicek dan dikabari. Melalui jawaban dari wahyu anggaran yang digunakan dari bantuan keuangan dan dibantu oleh warga Rw 01 ditambah dengan swadaya warga ucap Wahyu. (Lie/Khol/bersambung)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Mabes Polri Dalam Dugaan Kecurangan UKK Delta Tirta, Pansel: Peserta Mencontek Bisa Didiskualifikasi

10 Juni 2026 21:52 WIB -
oleh redaksi



Seleksi Calon Direksi Delta Tirta Sidoarjo menuju sorotan

Sidoarjo, petisi.co – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo akhirnya angkat bicara terkait dugaan aksi "ngerpek" atau menyontek saat ujian berlangsung di salah satu ruang di Mapolda Jatim, pada Rabu 3 Juni 2026.

Ketua Pansel sekaligus Sekda Sidoarjo, Fenny Abridawati melalui anggota Muhammad Nur menjelaskan aksi tidak terpuji yang diduga dilakukan 2 peserta dengan membawa bocoran kunci jawaban kini tengah ditangani serius dan dalam Mabes Polri sebagai penyelenggara tes.

"Kita bekerjasama dengan Mabes Polri dan sudah melaporkan ke sana untuk dilakukan pembuktian itu. Karena pelaksana tes dari Mabes Polri. Mereka klan ada CCTV juga," ungkap Muhammad Nur melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2026).

Meski begitu, dia tidak berani terburu-buru mengambil kesimpulan terkait sanksi kepada peserta yang diduga berbuat curang saat ujian. Sebab butuh minimal 2 alat bukti untuk mendiskualifikasi seseorang peserta seleksi.

"Butuh 2 alat bukti, sementara itu belum tercukupi, kami belum bisa jawab. Namun kalau semacam itu, menurut saya sudah melanggar SOP ya didiskualifikasi," tekan Kabag Perekonomian Sidoarjo ini.

Sportivitas peserta, lanjutnya menjadi penilaian tim pansel. Kejujuran dan dedikasi baik sangat diharapkan dalam pelaksanaan ujian seleksi.

"Itu ada nilainya tersendiri. Sementara yang dinilai oleh Mabes Polri ada 8 bidang. Karena tes psikometri hanya sebagian kecil saja. Tes psikometri ini untuk melihat wajahnya kayak apa sih, khan gitu," terangnya memberi penjelasan.

Muhammad Nur juga belum bisa memastikan hasil pemeriksaan yang dilakukan Mabes Polri akan keluar kapan. Kini pihaknya masih menunggu dan hanya bersifat menerima laporan saja.

"Semua bergantung sana, pansel hanya menerima hasil laporan. Termasuk hasil tes psikologi maupun tes tertulisnya seperti apa dari Mabes semua," kata dia.

Terkait permasalahan ini, pansel mengaku sudah menerima rekomendasi dan masukan dari Komisi B DPRD Sidoarjo. Pansel kini tengah intens berkomunikasi dengan Mabes Polri sebagai penyelenggara dan Polda Jatim yang ketempatan.

"Memang ada, tapi semua melalui Bu Sekda selaku ketua pansel. Beliau juga sudah melangkah ke Mabes Polri dan sudah koordinasi juga dengan Polda Jatim," ujarnya mengakhiri percakapan.

Sementara dihubungi terpisah, salah seorang peserta Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo, Nanang Haromain, menyampaikan gambaran lokasi tempat duduk peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Tes dilaksanakan menggunakan komputer dan seluruh alat elektronik maupun ponsel milik peserta dikumpulkan di pengawas.

"Duduknya dua baris memanjang ke belakang, ada sisi kiri dan sisi kanan. Semua peserta berjumlah 30 orang dijadikan satu ruangan. Ada pengawas sekitar 4 orang dan ada CCTV," ucap Nanang.

Meski begitu, ia menegaskan tidak tahu persis posisi duduk dari 2 peserta yang diduga mencontek kunci jawaban seperti yang disebut di sejumlah pemberitaan.

"Yang diduga mencontek bocoran mungkin posisinya di sisi kiri, kalau saya di sisi kanan. Jadi saya tidak tahu persis duduknya 2 peserta itu," akunya.

Nanang menyebut rangkaian UKK kurang satu tahap lagi yakni tes wawancara yang akan dilaksanakan Sabtu-Minggu, 13-14 Juni 2026.

"Tes wawancara bagian dari UKK, dilaksanakan 2 hari Sabtu dan Minggu besok," sebutnya.

Mencegah terulangnya kecurangan, Nanang mendesak Pansel untuk mengambil langkah radikal demi menyelamatkan kredibilitas proses seleksi. Ia mengusulkan agar tahapan wawancara dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung (live streaming).

"Proses yang terbuka akan membuktikan yang terpilih benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas dan kemampuan manajerial, bukan karena kedekatan politik maupun hubungan personal. Apalagi, sampai ada isu (nyontek) seperti itu," seru Nanang.

Menurutnya, live streaming saat sesi wawancara adalah obat penawar paling mujarab untuk membungkam spekulasi negatif publik. Dengan disiarkan langsung, masyarakat Sidoarjo bisa melihat langsung mana calon yang otaknya "kosong" karena mengandalkan bocoran.

"Termasuk mana calon yang benar-benar memiliki visi maupun misi brilian (cerdas) untuk memajukan perusahaan air bersih itu," ungkap mantan Komisiner KPU Sidoarjo ini.

Nanang yang dikenal memiliki berbagai kompetensi ini menambahkan, keterbukaan informasi ini sangat penting untuk meruntuhkan stereotip negatif yang selama ini melekat di masyarakat. Alasannya, jabatan mentereng di tubuh BUMD kerap dicurigai hanya menjadi ajang "bagi-bagi kue" atau jatah posisi bagi orang-orang lingkaran dalam Kepala Daerah yang menang Pilkada.

"Seluruh tahapan seleksi harus dilakukan secara profesional, objektif dan transparan. Kita ingin menghasilkan pemimpin BUMD yang mampu membawa perusahaan daerah berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Sidoarjo, bukan yang masuk lewat cara-cara curang," tegas Nanang yang juga mantan Presidium MD Kahmi Sidoarjo periode 2019 – 2025 ini.

Seperti ramal diberitakan sebelumnya, isu peserta seleksi Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo mencontek mencuat setelah sebuah surat kaleng misterius mendarat di meja Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Surat blak-blakan dalam bentuk pesan WA itu, mengungkap adanya indikasi kecurangan masif. Dugaan kuat ada 2 peserta seleksi yang diduga membawa bocoran jawaban saat mengikuti tahapan tes psikologi dan tes kompetensi akademis.

Sontak, kabar ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang menginginkan perbaikan di tubuh BUMD Sidoarjo tersebut. (uk)



Korsupgah KPK di Kantor Pemkab Sidoarjo: Dari Supervisi Anggaran Hingga Kekerasan Wartawan

10 Juni 2026 21:37 WIB -
oleh redaksi



Bupati Subandi saat menghadiri pentas PAI di SD Muhammadiyah 1 Candi Sidoarjo

Sidoarjo, petisi.co - Bupati Sidoarjo, H. Subandi enggan memberikan komentar terkait kabar islah dengan Wakil Bupati Mimik Idayana seperti yang beredar di pemberitaan media. Bupati Subandi hanya tertawa lebar dan menyebut satu kata sebanyak 5 kali saat dikonfirmasi perihal hubungannya dengan Wabup Mimik diberitakan sudah akur.

"Uwis, uwis, uwis, uwis, uwis," ucap Bupati Subandi tertawa usai menghadiri acara pentas PAI Kabupaten Sidoarjo di SD Muhammadiyah 1 Candi, di Kawasan Sidodadi, Rabu pagi (10/6/2026).



Pergalaman ketat gerbang utama kantor Pemkab Sidoarjo saat dihadiri tim Korsupgah KPK

Kemudian, Subandi memilih cepat masuk mobil menghindari wartawan ketika disinggung pertanyaan lebih jauh, seputar pertemuannya dengan Wabup Mimik di acara Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Pemkab Sidoarjo, pada Selasa 9 Juni 2026.

Demikian pula dengan Mimik Idayana, saat dikonfirmasi melalui nomor pribadinya juga tidak memberikan respon.

Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar, betulkah komunikasi antar keduanya sudah mencair seperti yang digambarkan hangat dan akrab di acara kantor pemkab. Ataukah terjadi hanya sesaat karena ada tim KPK di sana.

Sebelumnya, diketahui Tim Korsupgah KPK RI melaksanakan kegiatan tertutup di lantai 3 kantor Pemkab Sidoarjo dari Pukul 08.00 WIB hingga berakhir tepat pukul 18.00 WIB.

Selama kegiatan berlangsung sekitar Pemkab Steril kendaraan dan akses masuk dijaga ketat anggota Satpol PP.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Kepala Bidang (Kabid) hingga Camat hadir di acara tersebut. Tidak ada satu pun yang diwakilil. Demikian pula DPRD Sidoarjo. Sekretariat Dewan, pimpinan, serta anggota DPRD Sidoarjo juga datang.

"Cuma yang berhalangan. Karena sakit, naik haji, dan melahirkan. Terpaksa absen. Acaranya digelar di satu ruangan, dihadiri 4 orang dari KPK," ungkap salah seorang Kepala OPD yang tidak ingin namanya disebutkan.

Sumber internal di lokasi acara menyebutkan Korsupgah KPK membahas praktik tata kelola pemerintah daerah. Termasuk menelanjangi pengelolaan anggaran bersumber dari APBD. Sejumlah materi yang dibedah antara lain Pokok Pikiran (Pikiran) DPRD, anggaran narasumber dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

"Hanya kegiatan biasa, gak onok opo-opo (gak ada apa-apa)," ucap anggota DPRD Sidoarjo, H. Usman, dengan langkah cepat menghindari kejaran wartawan.

"Semuanya hadir di lantai 3. Melok Kabeh (ikut semua) OPD hingga DPRD. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan," jawab singkat Direktur RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdillah Segaf Alhadad.

Sejumlah pejabat yang ditemui awak media berusaha menghindar dan memilih bungkam. Mereka berhamburan melalui pintu barat kantor Pemkab Sidoarjo, seraya berlarian kecil menuju kendaraan masing-masing.

Upaya wartawan petisi.co menggali informasi melalui akses utama kantor Pemkab Sidoarjo disisi utara, sempat diwarnai aksi arogansi dari salah satu petugas satpol PP yang melakukan pengaman. Oknum berinisial KB bertindak anarkis dengan mencengkram lengan, sambil mengeluarkan kata-kata larangan mengambil gambar dan menyuruh file rekaman video dihapus.

Kekerasan wartawan yang dilakukan oknum anggota satpol PP itu, makin mempertegas kegiatan yang digelar di kantor Pemkab Sidoarjo bukan sekedar acara sosialisasi dan supervisi KPK biasa. Namun juga diduga ada pemeriksaan yang mengarah kepada dugaan korupsi.

"Gak mungkin sekedar sosialisasi atau supervisi biasa. Sebab seluruh dinas dan OPD di acara ini diwajibkan menyerahkan dokumen dan laporan keuangan dari tahun 2023 hingga 2025. Kita ingat tahun 2023 juga ada Korsupgah, setahun kemudian persisnya 2024, Bupati GM (Gus Mudhlor) ditangkap KPK. Apakah ini akan terjadi begitu lagi?," tandas sumber internal yang tak ingin namanya ditulis. *(luk)*

Di tag [Kekerasan Wartawan](#) [Korsupgah KPK](#) [Pemkab Sidoarjo](#)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Breaking News

Bupati Sidoarjo Dorong Kemajuan Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Sido

☰ **RADAR-TODAY.com**
AKTUAL-TERPERCAYA



Beranda > Kesehatan >

Kesehatan, Pembangunan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan, Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Dorong Kemajuan Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Sidoarjo

Redaksi
Juni 11, 2026



Sidoarjo | Radar-today – Bupati Sidoarjo H. Subandi terus mendorong kemajuan lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya lembaga pendidikan negeri saja yang didorong. Namun juga lembaga pendidikan swasta juga harus mampu menjadi pondasi utama pembangunan bangsa.

Generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing diharapkan mampu dicetak di sekolah-sekolah swasta. Salah satunya dapat dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Candi. Hal tersebut diucapkan Bupati Sidoarjo H.

Subandi usai membuka Pentas Pendidikan Agama Islam/PAI tingkat SD se Kabupaten Sidoarjo di SD Muhammadiyah 1 Candi, Rabu, (10/6). Bupati H. Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen membantu kemajuan sekolah-sekolah swasta yang ada.

Ia berharap sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Sidoarjo mampu bersaing dengan sekolah negeri. Tidak hanya pada sarana dan prasarana saja, namun juga pada manajemen pengelolaan sekolah.

Ia ingin lembaga pendidikan swasta dapat berjalan bersama untuk mencetak generasi bangsa yang berkarakter dan berdaya saing global. "SD Muhammadiyah 1 Candi ini kita dorong untuk mampu bersaing, tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah lainnya karena sekolah adalah tempat untuk membentuk karakter anak yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual namun juga berakhlak mulia," ucapnya. Bupati H. Subandi sendiri merasa bangga dengan berdirinya SD Muhammadiyah 1 Candi.

Menurutnya sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang cukup baik dalam pengelolaannya. Ia melihat pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut masih terus berlangsung.

Ia pun akan berupaya membantu anggarannya. Anggaran tersebut akan diperolehnya melalui anggota DPRD Jatim yang tak lain istrinya sendiri dr. Sriatun. Seperti bantuan yang diberikan tahun kemarin di Desa Pabean dan MI di Desa Pabean.

"Meski ada efisiensi, Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memberikan bantuan seperti kepada SD Muhammadiyah 1 Candi yang akan kita upayakan, insyaallah ada bantuan dari provinsi, dari ibu bupati, nanti kita siapkan setidaknya Rp. 2 miliar pada tahun anggaran 2027," ujarnya.(rin)

Berita Terkait

